

Analisis Alokasi Dana Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024

Mohammad Efendi Yusuf¹, Hikmal Nanta Kusuma Wildani Akbar², Isma Sauja Ayugya³, Putri Catur Lestari⁴

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹massefendi62@gmail.com ²hikmalnanta014@gmail.com ³ismasaujaayugya@gmail.com, ⁴Putricatur25@gmail.com

Abstract

The fishermen's insurance premium payment assistance program is one of the government's policies to improve welfare and protection for fishermen. This research aims to analyze the allocation of funds for assistance in paying fishermen's insurance premiums which are managed by the District Fisheries Service. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation and document study. The research results show that the allocation of aid funds still faces several challenges, such as budget limitations, the verification process for beneficiary fishermen, and administrative obstacles in distributing funds. In addition, the effectiveness of this program is influenced by the level of outreach to fishermen as well as the monitoring mechanisms implemented by the relevant agencies. Therefore, an optimization strategy is needed in budget management and increased coordination between local governments and fishermen to ensure that insurance premium assistance can be right on target and sustainable.

Keywords: Fund Allocation, Fishermen's Insurance, Government Assistance, Fisheries Service

Abstrak

Program bantuan pembayaran premi asuransi nelayan merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi dana bantuan pembayaran premi asuransi nelayan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana bantuan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, proses verifikasi nelayan penerima manfaat, serta kendala administratif dalam penyaluran dana. Selain itu, efektivitas program ini dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi kepada nelayan serta mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan nelayan untuk memastikan bantuan premi asuransi dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Alokasi Dana, Asuransi Nelayan, Bantuan Pemerintah, Dinas Perikanan.

PENDAHULUAN

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah dan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, profesi nelayan memiliki tingkat risiko yang tinggi, seperti cuaca ekstrem, kecelakaan kerja, serta ketidakpastian hasil tangkapan. Untuk memberikan perlindungan sosial bagi nelayan, pemerintah menginisiasi program bantuan pembayaran premi asuransi nelayan yang dikelola oleh Dinas Perikanan di berbagai daerah, termasuk di tingkat kabupaten.

Alokasi dana untuk program ini menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas perlindungan yang diberikan kepada nelayan. Pengelolaan dana yang tepat dapat memastikan bahwa manfaat asuransi dapat dinikmati oleh kelompok sasaran secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap alokasi dana bantuan ini guna mengevaluasi efektivitasnya serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Program asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial dan ekonomi bagi nelayan jika terjadi kecelakaan kerja, cacat, atau kematian. Bantuan pembayaran premi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memastikan mereka mendapatkan perlindungan finansial dalam kondisi darurat. Namun, efektivitas alokasi dana bantuan tersebut masih menjadi pertanyaan, mengingat adanya tantangan dalam penyaluran dana, validasi penerima manfaat, serta kendala administratif lainnya. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah bagaimana memastikan bahwa alokasi dana bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh nelayan yang berhak. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat seringkali menjadi hambatan dalam penyaluran dana bantuan. Faktor lainnya meliputi transparansi dalam pengelolaan anggaran, efisiensi distribusi dana, serta sejauh

1

2

3

4

mana bantuan ini memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan. Oleh Karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana alokasi dana bantuan pembayaran premi asuransi nelayan di Kabupaten Jember pada tahun 2024.

Analisis ini akan mencakup mekanisme alokasi, efektivitas program dalam memberikan perlindungan kepada nelayan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana bantuan serta memastikan bahwa seluruh nelayan yang memenuhi syarat dapat merasakan manfaat dari program asuransi ini. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Jember secara berkelanjutan.

METODE

Dalam penelitian ini ada dua metode yang difokuskan karena dalam penelitian tersebut mencakup semua metode yaitu Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Kualitatif Deskriptif Dan Metode Analisis Data Sekunder atau Kuantitatif . Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam mekanisme alokasi dana, peran Dinas Perikanan dalam penyaluran bantuan, serta kendala yang dihadapi nelayan dalam mengakses program asuransi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan kajian dokumen resmi guna memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi program. Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu instansi pemerintahan daerah, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta analisis dokumen. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dirancang secara sistematis. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, metode purposive sapling diterapkan, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data yang tidak dapat dikumpulkan melalui observasi atau wawancara.

Adapun data yang digunakan dalam metode ini berasal dari majalah, internet, artikel terkait dan semacamnya. Serta Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Analisis Data Sekunder dengan pendekatan kuantitatif untuk menelaah besaran dana yang dialokasikan, jumlah penerima manfaat, serta efektivitas realisasi anggaran dalam mendukung perlindungan nelayan. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan Dinas Perikanan, dokumen BPJS Ketenagakerjaan, serta regulasi terkait program asuransi nelayan. Hasil analisis kuantitatif ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara alokasi anggaran dan tingkat pemanfaatannya oleh nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengalokasian Dana bantuan pembayaran premi asuransi nelayan pada Dinas Kabupaten Jember Tahun 2024

Pada tahun 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Jember melaksanakan program bantuan pembayaran premi asuransi bagi nelayan melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan yang termasuk dalam kategori pekerja rentan, mengingat tingginya risiko kerja yang mereka hadapi. Asuransi yang diberikan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sebanyak 998 nelayan di Kabupaten Jember telah didaftarkan dalam program ini, dengan premi asuransi ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jember hingga Desember 2024. Kegiatan sosialisasi dan pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan pada 3 Juli 2024 di Balai Dusun Watu Ulo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ambulu. Mekanisme pengalokasian dana bantuan pembayaran premi asuransi nelayan di Kabupaten Jember melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

- Kordinasi Dengan Pihak Desa Setempat
- Pendataan dan Pendaftaran Nelayan
- Verifikasi Data dan Validasi Data
- Pengajuan kepada Dinas Pemerintah Kabupaten Jember
- Pengalokasian Dana
- Pembayaran Premi Asuransi

B. Dana yang diterima Dinas Perikanan Kabupaten Jember dari Kantor PEMKAB JEMBER untuk program Asuransi Nelayan Dan Dana yang dibayarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan program Asuransi Nelayan kepada Pihak BPJS Ketenagakerjaan Pada Tahun 2024

Sumber dana untuk kegiatan Belanja Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Jember pada DPA penggunaan Kabupaten Jember Tahun 2024, melalui Rencana kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Dinas Perikanan Kabupaten Jember dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 151.041.796,00** (Seratus lima puluh satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah.). Dalam jangka waktu 9 bulan untuk pelaksanaan pembayaran Premi Asuransi kepada Pihak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk Anggaran dana buat Bantuan Program Premi Asuransi Nelayan sebesar RP. 151.041.796,00 dengan Rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA
1.	Premi Asuransi Nelayan	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	998	Orang	10.000
		Jaminan Kematian (JKM)	998	Orang	6.800

Jadi untuk Alokasi Dana yang dibayarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember pada Tahun 2024 Sebesar Rp 16.800 Per bulan untuk setiap orang/ nelayan yang sudah terdaftar dalam penerima kartu premi Asuransi atau kartu BPJS

Ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk rincian Alokasi dana yang di bayarkan kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan di bayarkan pada Bulan April – Desember Tahun 2024 dengan Rincian Sebagai berikut :

No.	Bulan	Harga/ Per orang	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan
1	April	Rp 16.800,00	Sudah Dibayarkan
2	Mei	Rp 16.800,00	Sudah Dibayarkan
3	Juni	Rp 16.800,00	Sudah Dibayarkan
4	Juli	Rp 16.800,00	Sudah Dibayarkan
5	Agustus	Rp 16.800,00	Sudah Dibayarkan
6	September	Rp 16.800,00	Sudah Dibayarkan
7	Oktober	Rp 16.800,00	Sudah Dibayarkan
8	November	Rp 16.800,00	Sudah Dibayarkan
9	Desember	Rp 16.800,00	Sudah Dibayarkan
Total		Rp 151.200,00	

Jadi Untuk Pembayaran Premi Asuransi yang dibayarkan langsung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember Kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam 9 bulan dari Bulan April- Desember 2024 Sebesar Rp 151.200,00 Per Orangnnya. Dalam hal ini untuk rincian keseluruhan Penerima kartu Asuransi Nelayan ada 998 orang yang menerima dan mendapatkan kartu tersebut, sehingga dikalkulasikan sebagai berikut :

NO.	Penerima Kartu Premi Asuransi	Pelaksanaan Pembayaran dalam bulan April- Desember 2024 (09 Bulan).	Total Keseluruhan (Penerima Kartu x Jumlah Pembayaran bulan April – Desember)
1.	1 orang	Rp 151.200,00	Rp 151.200,00
2.	998 orang	Rp 151.200,00	Rp 150.897.600,00

Jadi dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya untuk Pembayaran Premi Asuransi Nelayan yang dibayarkan langsung melalui Dinas Perikanan Kabupaten Jember Kepada Pihak BPJS Ketenagakerjaan Per orangnya sebesar Rp 151.200,00 dalam 9 bulan. Data dari Dinas Perikanan Kabupaten Jember untuk penerima kartu Asuransi Nelayan sebanyak 998, jadi Total Keseluruhan yang harus dibayar dalam waktu 9 bulan / periode tahun 2024 adalah sebesar Rp. 150.897.600,00. Untuk anggaran dana buat Program Asuransi Nelayan ini tersisa sebesar Rp 144.196,00. Dibuat Untuk keperluan dan kekurangan anngaran program lain / kas Dinas Perikan Kabupaten Jember.

C. Berapa besar santunan yang diberikan dalam klaim asuransi nelayan untuk kecelakaan kerja.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja terhadap risiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja. Manfaat yang diberikan mencakup santunan finansial dan/atau pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja, baik saat dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja hingga kembali, maupun akibat penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan kerja. Dalam program ini, nelayan atau ahli warisnya berhak memperoleh berbagai manfaat, di antaranya:

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di rincikan sebagai berikut :
 - a. Biaya Pengangkutan Maksimum : Dalam situasi ini, jika menggunakan lebih dari satu jenis jasa angkutan, maka berhak menerima biaya maksimal untuk setiap jenis angkutan yang digunakan pada saat nelayan di laut atau bekerja di instansi/ Pemerintah.
 - b. Biaya Pengobatan dan Perawatan : Biaya Pengobatan dan Perawatan sesuai kebutuhan medisnya termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan juga BPJS Ketenagakerjaan Menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis yang diperlukan akibat kecelakaan kerja hingga peserta sembuh.
 - c. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB): Memberikan pengganti upah selama nelayan tidak mampu bekerja karena kecelakaan. Dengan rincian sebagai berikut :

Enam Bulan Pertama	100 % x Upah Sebulan
Enam Bulan Kedua	100 % x Upah Sebulan
Enam Bulan Ketiga dan Seterusnya	50 % x Upah Sebulan

Penggantian Gigi Tiruan : Memberikan pelayanan kepada nelayan atau orang yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan apabila mengalami kecelakaan kerja. Dengan memberikan pengobatan yang insentif atau juga berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 maksimalnya.

- d. Penggantian Alat Bantu Pendengaran : Diberikan kepada peserta yang mengalami gangguan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, dengan batas maksimal sebesar Rp. 2.500.000,00.
- e. Penggantian Kacamata : Diberikan kepada peserta yang mengalami gangguan penglihatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, dengan batas maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00.
- f. Santunan Cacat: Jika terjadi cacat akibat kecelakaan kerja, diberikan santunan sesuai dengan tingkat kecacatan yang dialami. Berikut adalah Tabel Santunan Cacat :

Berikut adalah tabulasi informasi tentang Santunan apabila terjadi kecatatan akibat kecelakaan kerja :

Jenis Cacat	Deskripsi Santunan
-------------	--------------------

Anatomi Cacat	Santunan dihitung berdasarkan persentase sesuai tabel, dikalikan 80, kemudian dikalikan dengan upah sebulan.
Cacat Total	Santunan sekaligus sebesar 56 kali gaji atau secara berkala selama 24 bulan dengan Rp 500.000,00 per bulan. Beasiswa maksimal diberikan untuk dua anak.
Cacat Fungsi	Santunan dihitung berdasarkan persentase pengurangan fungsi, dikalikan dengan persentase dalam tabel, kemudian dikalikan dengan 80 kali upah bulanan.

Untuk informasi lebih rinci mengenai persentase kecacatan untuk berbagai jenis cacat anatomis, Anda dapat merujuk pada Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Tabel tersebut memuat persentase kecacatan untuk berbagai kondisi, seperti:

- Kehilangan lengan kanan dari sendi bahu ke bawah: 40%
- Kehilangan lengan kiri dari sendi bahu ke bawah: 35%
- Kehilangan kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah: 70%
- Kehilangan sebelah mata: 35%

Persentase ini digunakan dalam rumus perhitungan untuk menentukan besaran bantuan yang diterima oleh peserta yang menderita cacat sebagian anatomis. Perlu dicatat bahwa besaran santunan sangat bergantung pada jenis kecacatan dan upah bulanan yang dilaporkan. Oleh karena itu, penting bagi peserta untuk memastikan bahwa data upah yang dilaporkan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Jaminan Kematian (JKM)

- a) Santunan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja: Apabila nelayan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak menerima santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Atau memberikan santunan sebesar Rp20.000.000,00.
- b) Santunan Berkala: Tambahan santunan sebesar Rp12.000.000 yang dibayarkan sekaligus.
- c) Biaya Pemakaman: Menanggung biaya penyelenggaraan pemakaman hingga Rp10.000.000.
- d) Beasiswa Pendidikan: Menyediakan beasiswa pendidikan bagi maksimal dua anak peserta, dengan total manfaat hingga Rp174.000.000, asalkan peserta telah memiliki masa iur minimal tiga tahun.

Berikut ini adalah contoh Tabel Perhitungan dalam alokasi dana yang diterima ketika mengalami kecelakaan kerja atau kecelakaan yang tidak bisa ditolong nyawanya/ Meninggal (JKM)

Santunan atau bantuan Jaminan Kematian (JKM).	Jumlah Anggaran atau uang yang diterima
Dibayarkan Sekaligus	48 kali upah
Dibayarkan secara Berkala (24 Bulan)	Rp 500.000,00 x 24 Bulan = Rp 12.000.000,00
Biaya Pemakaman	Rp 10.000.000,00

D. Peran dari Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam membantu nelayan yang mengalami kesulitan dalam proses klaim asuransi.

Dinas Perikanan Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam membantu nelayan yang mengalami kesulitan dalam proses klaim asuransi. Beberapa bentuk bantuan yang diberikan antara lain:

- a) Pendampingan Administratif
- b) Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
- c) Sosialisasi dan Edukasi
- d) Memonitor dan Mengevaluasi Klaim

Dengan peran ini, Dinas Perikanan Kabupaten Jember memastikan bahwa nelayan yang berhak menerima klaim asuransi dapat mengaksesnya dengan lebih mudah dan cepat, sehingga mereka mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan pekerjaannya.

E. Kendala yang sering dihadapi nelayan dalam mengajukan klaim asuransi kecelakaan kerja.

Nelayan sering menghadapi berbagai kendala dalam mengajukan klaim asuransi kecelakaan kerja. Beberapa kendala yang umum terjadi meliputi:

- a) Kurangnya Pemahaman tentang Prosedur Klaim
- b) Dokumen yang Tidak Lengkap atau Tidak Valid
- c) Kesulitan dalam Melaporkan Kecelakaan dengan Cepat
- d) Proses Verifikasi yang Lama.
- e) Kurangnya Pendampingan dari Pihak Terkait
- f) Penolakan Klaim karena Tidak Memenuhi Syarat
- g) Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Asuransi

KESIMPULAN

Alokasi dana bantuan untuk pembayaran premi asuransi nelayan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kendala dalam distribusinya, seperti keterbatasan data nelayan yang valid dan keterlambatan pencairan dana. Program ini memberikan manfaat yang signifikan bagi nelayan dalam meningkatkan perlindungan terhadap risiko kerja di laut. Asuransi ini membantu mengurangi beban finansial akibat kecelakaan atau musibah yang dialami nelayan.

Beberapa kendala dalam implementasi program ini meliputi kurangnya sosialisasi kepada nelayan, rendahnya pemahaman nelayan tentang pentingnya asuransi, serta prosedur administrasi yang masih dianggap rumit.

Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan nelayan, peningkatan sosialisasi, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar lebih mudah diakses oleh nelayan. Selain itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan dana dialokasikan secara tepat sasaran dan efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini sehingga dalam proses pengerjaan penelitian ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal sesuai yang diharapkan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nur Muhammad Syukri Albani Nasution “ Analisis Partisipasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpecah di Kota Sibolga. JURNAL LENTERA BISNIS ISSN Cetak 2252-9993, ISSN Online 2598-618X Volume 13, Nomor 3, September 2024.
- Bappenas. Pedoman Penyusunan Anggaran dan Alokasi Dana untuk Program Pembangunan (2020). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Eden, R. N. (2019). Analisis Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Nelayan Guna Meningkatkan Perekonomian Lingkungan Pesisir Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara
- Efendi, Zahrun “Analisis Alokasi Dana Bantuan Pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan Kota Tsanjung Pinang”. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG 2022.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP). (2019). Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.
- Nafidah, L. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Akmenbis), 1(2).
- Nainggolan, F. R. H., Hartono, B., & Adam. (2023). Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir di Kabupaten Deli Serdang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(3), 1881-1893.
- Noormalasari, Widya Nuryadi, Christyana Sandra. “ Kemampuan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Nelayan di Kabupaten Jember. e-Jurnal Pustaka Kesehatan, vol. 3 (no. 1) Januari 2015.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan. Jakarta : 30 Desember 2020.
- Permatasari, Linda, Pudjo Suharso, Wiwin Hartanto. “ Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember “ Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomer 1 (2020).
- Prakarsa, C. (2020). Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Universitas Sriwijaya.
- .